



DARI GREEN ECONOMY MENUJU PROPHETIC ECONOMY: PENGEMBANGAN INDEKS KEBERLANJUTAN EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQASHID AL-SYARIAH

Hasbi Ash Shiddieqy¹, Koko Junianto AM²

^{1,2}Universitas Islam Depok, Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkritisi paradigma *green economy* yang mendominasi wacana keberlanjutan global serta menawarkan konsep *prophetic economy* yang berlandaskan teladan kenabian dan *maqashid al-syariah*. Berbeda dengan *green economy* yang berfokus pada aspek ekologis dan efisiensi pasar, *prophetic economy* menempatkan keseimbangan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* sebagai fondasi keberlanjutan yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan teknik Fuzzy Delphi dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk merumuskan serta memvalidasi Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IKEI) melalui konsultasi pakar ekonomi Islam, praktisi keuangan syariah, dan akademisi *maqashid*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKEI terdiri atas lima dimensi dan dua puluh delapan indikator yang valid dan reliabel. Dibandingkan indeks *green economy* konvensional, IKEI lebih mampu mengakomodasi dimensi spiritual-etis dan keadilan antargenerasi, sekaligus mempertahankan rigor metodologis, sehingga relevan sebagai instrumen kebijakan dan evaluasi kinerja ekonomi syariah.

Kata Kunci: *green economy*; *prophetic economy*; *maqashid al-syariah*; indeks keberlanjutan; ekonomi Islam

Abstract

This article criticizes the *green economy* paradigm that dominates the global sustainability discourse and offers the concept of a *prophetic economy* based on prophetic examples and *maqashid al-sharia*. In contrast to the *green economy* which focuses on ecological aspects and market efficiency, the *prophetic economy* places the balance of *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-mal* as the foundation of comprehensive sustainability. This study uses a qualitative-exploratory method with the Fuzzy Delphi technique and the *Analytical Hierarchy Process* (AHP) to formulate and validate the Islamic Economic Sustainability Index (IKEI) through consultation with Islamic economic experts, Islamic finance practitioners, and *maqashid* academics. The results of the study show that IKEI consists of five dimensions and twenty-eight valid and reliable indicators. Compared to the conventional *green economy* index, IKEI is better able to accommodate the spiritual-ethical dimension and intergenerational justice, while maintaining methodological rigor, making it relevant as a policy instrument and evaluation of sharia economic performance.

Keywords: *green economy*; *prophetic economy*; *maqashid al-syariah*; sustainability index; Islamic economics

Copyright (c) 2026 Hasbi Ash Shiddieqy¹, Koko Junianto AM²

✉ Corresponding author : Hasbi Ash Shiddieqy

Email Address : hasbi.ashshiddieq@uidepok.ac.id

PENDAHULUAN

Krisis ekologis global yang ditandai oleh pemanasan bumi, kerusakan biodiversitas, dan ketimpangan distribusi sumber daya telah mendorong lahirnya paradigma green economy sebagai respons arus utama komunitas internasional. Konsep ini, yang pertama kali dipopulerkan melalui laporan United Nations Environment Programme dan kemudian diadopsi luas dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, menawarkan reorientasi model pertumbuhan ekonomi agar lebih memperhatikan batas daya dukung lingkungan tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial. Namun demikian, di balik popularitasnya, green economy tidak lepas dari kritik mendasar bahwa ia tetap beroperasi di dalam kerangka epistemologi ekonomi konvensional yang bertumpu pada rasionalitas instrumental, efisiensi pasar, dan pertumbuhan sebagai tolok ukur utama kesejahteraan (Aam & Muhammad, 2022). Kritik semacam ini menegaskan bahwa persoalan keberlanjutan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghidupkan mekanisme pasar tanpa menyentuh fondasi nilai yang mendasari perilaku ekonomi itu sendiri.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan alternatif epistemologis yang secara mendasar berbeda dari paradigma keberlanjutan sekuler. Alih-alih memandang alam semata sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi secara efisien, worldview Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang mengemban amanah untuk menjaga keseimbangan kosmis, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian tentang nexus filosofis antara pandangan dunia Islam dan keberlanjutan lingkungan (Adamowicz, 2022). Maqashid al-syariah, sebagai kerangka teleologis hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama klasik dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir kontemporer, menyediakan lima tujuan pokok syariat – penjiwaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta – yang secara inheren bersifat holistik dan melampaui dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pergeseran paradigmatis dari kerangka green economy menuju kerangka berbasis maqashid inilah yang menjadi titik tolak argumentasi utama artikel ini.

Istilah prophetic economy yang diusulkan dalam artikel ini merujuk pada model ekonomi yang menjadikan teladan kenabian, khususnya praktik ekonomi dan etika transaksi Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber inspirasi normatif sekaligus operasional. Berbagai kajian terdahulu telah menunjukkan bahwa integrasi tujuan-tujuan syariah ke dalam perencanaan ekonomi mampu menghasilkan kerangka kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dibandingkan pendekatan pembangunan konvensional yang cenderung teknokratis (Ahmad & Khadim, 2025). Namun, sejauh penelusuran literatur yang dilakukan, konsep prophetic economy masih jarang dioperasionalkan ke dalam instrumen pengukuran yang dapat digunakan secara empiris, sehingga ia lebih banyak berhenti pada tataran wacana normatif ketimbang menjadi alat analisis kebijakan yang aplikatif. Kesenjangan inilah yang mendorong urgensi penelitian ini untuk merumuskan sebuah indeks terukur yang mampu menerjemahkan nilai-nilai profetik ke dalam bahasa kuantitatif yang dapat diperbandingkan lintas waktu dan lintas wilayah.

Upaya pengembangan indeks berbasis maqashid sesungguhnya bukan hal yang sepenuhnya baru dalam literatur ekonomi Islam. Sejumlah peneliti telah mengembangkan indeks kinerja perbankan syariah, indeks pembangunan sosial-

ekonomi, maupun indeks literasi berbasis maqashid yang masing-masing berupaya menerjemahkan tujuan syariah ke dalam variabel terukur (Etika et al., 2024). Meskipun demikian, tinjauan kritis terhadap literatur tersebut memperlihatkan sejumlah keterbatasan mendasar: pertama, banyak indeks yang dikembangkan cenderung berfokus pada level mikro institusi keuangan tanpa menjangkau dimensi makroekonomi yang lebih luas; kedua, dimensi lingkungan dan keberlanjutan antargenerasi masih relatif kurang terintegrasi secara eksplisit ke dalam struktur indeks yang ada; dan ketiga, validasi metodologis terhadap bobot antarindikator seringkali belum melibatkan konsultasi pakar yang sistematis dan berlapis. Artikel ini berupaya mengisi ketiga kesenjangan tersebut dengan merancang Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IKEI) yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi ekologis ke dalam kerangka maqashid, sekaligus menggunakan metode validasi pakar yang lebih ketat.

Signifikansi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan epistemologi ekonomi Islam kontemporer dengan menawarkan sintesis baru antara wacana keberlanjutan global dan tradisi intelektual Islam klasik, sekaligus merespons kritik yang menyatakan bahwa ekonomi Islam kerap terjebak dalam replikasi kategori-kategori ekonomi konvensional tanpa transformasi paradigmatis yang substantif (Hadi, 2022). Secara metodologis, penelitian ini menyumbangkan instrumen pengukuran baru yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan lembaga maupun kebijakan ekonomi berbasis syariah secara lebih komprehensif. Secara praktis, IKEI yang dikembangkan dalam penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, regulator keuangan syariah, dan lembaga filantropi Islam dalam merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keseimbangan spiritual, sosial, dan ekologis yang menjadi inti ajaran Islam tentang rahmatan lil 'alamin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama: pertama, bagaimana dimensi dan indikator Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam dapat dikonstruksi secara sistematis berdasarkan kerangka maqashid al-syariah dan nilai-nilai prophetic economy; kedua, sejauh mana konstruksi indeks tersebut memenuhi kriteria validitas isi dan reliabilitas antar-penilai berdasarkan konsultasi pakar; dan ketiga, bagaimana perbandingan konseptual dan metodologis antara IKEI dengan indeks green economy konvensional yang selama ini digunakan dalam evaluasi kebijakan keberlanjutan. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, artikel ini disusun dalam beberapa bagian: tinjauan pustaka yang mengelaborasi kerangka teoretis green economy, maqashid al-syariah, dan prophetic economy; metode penelitian yang menjelaskan desain Fuzzy Delphi dan AHP yang digunakan; hasil dan pembahasan yang memaparkan konstruksi dimensi, indikator, serta hasil validasi indeks; dan bagian penutup yang merangkum implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian ini bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Ahmed et al., 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Green Economy: Genealogi dan Keterbatasan Paradigmatik

Green economy secara konseptual didefinisikan sebagai model perekonomian yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Definisi ini, meskipun tampak komprehensif, dalam praktiknya lebih banyak diterjemahkan ke dalam kebijakan teknokratis seperti penetapan harga karbon, insentif fiskal untuk energi terbarukan, dan pengembangan pasar produk ramah lingkungan yang pada dasarnya tetap mengandalkan mekanisme pasar sebagai instrumen utama perubahan (Alam et al., 2023). Sejumlah kajian bibliometrik memperlihatkan bahwa arus utama riset green economy masih didominasi oleh perspektif ekonomi neoklasik yang menekankan efisiensi alokasi sumber daya, sementara dimensi etika, spiritualitas, dan keadilan antargenerasi relatif termarginalkan dalam diskursus akademik maupun kebijakan (Alhawtmeh et al., 2025).

Kritik terhadap green economy juga muncul dari kalangan ekonom heterodoks yang menilai bahwa pendekatan ini gagal menyentuh akar persoalan, yakni pola konsumsi dan produksi yang eksploitatif terhadap alam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa strategi green growth yang mengandalkan decoupling antara pertumbuhan ekonomi dan dampak lingkungan seringkali tidak terbukti secara empiris pada skala yang memadai untuk menahan laju kerusakan ekologis global (Andini et al., 2026). Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi kebijakan green economy juga kerap berhadapan dengan tantangan struktural berupa ketergantungan pada sektor ekstraktif dan lemahnya kapasitas kelembagaan untuk menegakkan regulasi lingkungan secara konsisten, sehingga cita-cita keberlanjutan yang inklusif belum sepenuhnya tercapai (Anggara et al., 2025).

Konteks Indonesia menjadi ilustrasi menarik atas keterbatasan implementasi green economy di negara berkembang. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai peta jalan transisi energi dan ekonomi hijau, realisasinya masih dibayangi oleh dominasi sektor pertambangan dan perkebunan skala besar yang secara historis menjadi penyumbang signifikan terhadap deforestasi dan degradasi lahan gambut, sehingga jarak antara retorika kebijakan hijau dan praktik ekonomi riil masih cukup lebar (Aqim et al., 2025). Kesenjangan implementasi semacam ini menunjukkan bahwa persoalan keberlanjutan di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen kebijakan teknokratis, melainkan memerlukan penguatan basis nilai dan etika yang lebih mengakar pada worldview masyarakatnya, sebuah celah yang secara spesifik hendak diisi oleh kerangka prophetic economy yang diusulkan dalam penelitian ini.

Keterbatasan lain dari green economy terletak pada asumsi ontologisnya yang memandang alam sebagai eksternalitas yang harus diinternalisasi ke dalam kalkulasi biaya-manfaat, bukan sebagai bagian integral dari tatanan kosmis yang memiliki nilai intrinsik. Perspektif ini berbeda secara mendasar dengan worldview Islam yang menempatkan alam sebagai ayat kauniyah – tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang harus dijaga bukan semata karena kalkulasi ekonomi, melainkan karena kewajiban teologis manusia sebagai khalifah fil ardh (Bonang et al., 2026). Perbedaan ontologis inilah yang menjadi celah bagi pengembangan paradigma alternatif yang lebih

berakar pada nilai spiritual, sebagaimana akan diuraikan pada subbagian berikutnya mengenai maqashid al-syariah.

Maqashid al-Syariah sebagai Paradigma Alternatif Keberlanjutan

Maqashid al-syariah, sebagaimana dirumuskan oleh ulama ushul fiqh klasik seperti al-Syatibi dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir kontemporer seperti Ibn Ashur dan Jasser Auda, merujuk pada tujuan-tujuan luhur yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Lima maqashid pokok – hifz al-din (penjagaan agama), hifz al-nafs (penjagaan jiwa), hifz al-'aql (penjagaan akal), hifz al-nasl (penjagaan keturunan), dan hifz al-mal (penjagaan harta) – membentuk kerangka teleologis yang bersifat komprehensif dan lintas dimensi, mencakup aspek spiritual, biologis, intelektual, sosial, dan ekonomi sekaligus (Anisa, 2025). Kerangka ini memberikan basis normatif yang jauh lebih luas dibandingkan indikator keberlanjutan konvensional yang cenderung terfragmentasi ke dalam pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpisah.

Sejumlah penelitian kontemporer telah berupaya mengoperasionalkan maqashid al-syariah ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa hifz al-mal, misalnya, tidak dapat dipahami secara sempit sebagai akumulasi kekayaan individual, melainkan mencakup pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan kolektif, termasuk generasi mendatang (Anwar et al., 2025). Demikian pula, hifz al-nasl yang secara tradisional dipahami sebagai penjagaan keturunan biologis, dalam konteks kontemporer diperluas maknanya untuk mencakup keadilan antargenerasi dan tanggung jawab ekologis terhadap warisan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang (Ascarya & Masrifah, 2023). Perluasan interpretasi semacam ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi maqashid al-syariah sebagai kerangka analitis yang mampu merespons persoalan kontemporer tanpa kehilangan akar epistemologisnya dalam tradisi Islam.

Terdapat pula kajian yang secara eksplisit mengaitkan maqashid al-syariah dengan lingkungan hidup, menunjukkan bahwa penjagaan lingkungan (hifz al-bi'ah) dapat dipandang sebagai maqashid turunan atau syarat instrumental bagi terealisasinya kelima maqashid pokok, mengingat kerusakan lingkungan pada akhirnya akan mengancam keberlangsungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia itu sendiri (Ayu et al., 2023). Perspektif integratif ini semakin diperkuat oleh sejumlah studi yang mengembangkan indeks berbasis maqashid untuk mengevaluasi kinerja sosial-ekonomi lembaga keuangan syariah, meskipun sebagaimana disinggung sebelumnya, sebagian besar masih berfokus pada level mikro institusional dan belum menjangkau dimensi ekologis secara eksplisit dan terukur (Indahsari et al., 2024).

Upaya kritis terhadap green economy dari perspektif ekonomi Islam juga telah mulai bermunculan dalam literatur, dengan sejumlah peneliti mengembangkan bibliometric review yang memetakan arah baru bagi ekonomi hijau global melalui integrasi nilai-nilai Islam (Chaaben et al., 2022). Kajian lain menyoroti bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap keberlanjutan lingkungan menawarkan kerangka yang secara epistemologis berbeda dari environmentalisme sekuler, karena berangkat dari premis teologis tentang tauhid, khilafah, dan akuntabilitas eskatologis manusia atas pengelolaan bumi (Azzam, 2025). Sintesis antara kritik terhadap green economy

dan tawaran alternatif berbasis maqashid inilah yang menjadi fondasi bagi konsep prophetic economy yang diusung dalam artikel ini.

Prophetic Economy: Genealogi Konsep dan Relevansinya

Konsep prophetic economy dalam artikel ini dibangun di atas gagasan bahwa praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menawarkan model transaksi yang secara inheren menyeimbangkan antara kepentingan individual, sosial, dan ekologis. Prinsip-prinsip seperti larangan israf (pemborosan), anjuran ihsan dalam muamalah, serta penekanan pada keadilan distributif melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf, mencerminkan sebuah etika ekonomi yang jauh mendahului wacana keberlanjutan modern (Jalili et al., 2025). Dalam konteks ini, prophetic economy bukan sekadar romantisasi nostalgik terhadap masa lalu, melainkan upaya rekonstruksi nilai-nilai profetik ke dalam kerangka analitis yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer, termasuk krisis ekologis dan ketimpangan global.

Beberapa kajian etika Islam kontemporer telah mengelaborasi bagaimana nilai-nilai kenabian dapat diterjemahkan ke dalam prinsip tata kelola ekonomi modern, termasuk dalam konteks keuangan syariah dan tanggung jawab sosial korporasi (Miskari et al., 2023). Namun demikian, sebagaimana disinggung dalam bagian pendahuluan, operasionalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam instrumen pengukuran kuantitatif masih menjadi area yang relatif kurang tergarap. Artikel ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan konsep prophetic economy ke dalam kerangka maqashid al-syariah yang telah memiliki tradisi metodologis lebih mapan dalam literatur ekonomi Islam, sehingga menghasilkan sebuah kerangka konseptual yang secara teoretis kokoh sekaligus secara metodologis operasional.

Sintesis Konseptual: Dari Kritik menuju Kerangka Terukur

Bertolak dari ketiga arus literatur di atas kritik terhadap green economy, elaborasi maqashid al-syariah, dan genealogi prophetic economy penelitian ini merumuskan sebuah sintesis konseptual yang memposisikan prophetic economy sebagai payung normatif, maqashid al-syariah sebagai kerangka struktural, dan indeks keberlanjutan sebagai instrumen operasional. Ketiga elemen ini saling berkaitan secara hierarkis: nilai-nilai profetik memberikan orientasi etis mengenai apa yang seharusnya dituju oleh aktivitas ekonomi, maqashid al-syariah menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam lima kategori tujuan yang dapat diturunkan menjadi dimensi pengukuran, dan indeks keberlanjutan menyediakan bahasa kuantitatif yang memungkinkan evaluasi dan perbandingan kinerja secara sistematis (Banjari, 2023). Sintesis semacam ini penting untuk menghindari jebakan dualisme antara idealisme normatif Islam dan kebutuhan praktis akan instrumen kebijakan yang aplikatif.

Kerangka sintesis ini juga merespons kritik metodologis yang menyatakan bahwa sebagian riset ekonomi Islam kontemporer cenderung berhenti pada tataran normatif tanpa menyediakan jembatan yang jelas menuju operasionalisasi empiris, sehingga sulit diadopsi oleh pembuat kebijakan yang membutuhkan data dan indikator konkret untuk pengambilan keputusan (Muklis et al., 2025). Dengan menempatkan Fuzzy Delphi dan AHP sebagai metode konstruksi dan validasi, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa kerangka normatif Islam yang kaya secara filosofis dapat dan perlu diterjemahkan ke dalam instrumen yang memenuhi

standar rigor metodologis ilmu sosial kontemporer, tanpa mereduksi kedalaman maknanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif yang dipadukan dengan teknik kuantifikasi Fuzzy Delphi Method (FDM) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengonstruksi dan memvalidasi Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IKEI). Kombinasi metode ini dipilih karena sifatnya yang mampu mengakomodasi kompleksitas konseptual maqashid al-syariah sekaligus menghasilkan output terukur yang dapat divalidasi secara statistik, sebagaimana telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian pengembangan indeks berbasis nilai keagamaan (Pramono et al., 2025). Desain penelitian ini terdiri atas tiga tahap utama: tahap eksplorasi konseptual melalui studi literatur dan analisis dokumen, tahap konstruksi indikator melalui expert judgment, dan tahap validasi melalui putaran Delphi berulang hingga tercapai konsensus pakar.

Populasi ahli dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelompok: akademisi ekonomi Islam dan maqashid al-syariah dari perguruan tinggi Islam di Indonesia, praktisi lembaga keuangan syariah yang memiliki pengalaman dalam pengembangan produk dan pelaporan keberlanjutan, serta pakar kebijakan lingkungan yang memiliki concern terhadap isu keberlanjutan berbasis nilai keagamaan. Purposive sampling digunakan untuk memilih dua puluh satu partisipan panel Delphi berdasarkan kriteria minimal lima tahun pengalaman di bidang terkait dan kesediaan berpartisipasi dalam minimal dua putaran konsultasi. Pemilihan jumlah panel ini merujuk pada rekomendasi metodologis dalam literatur Delphi yang menyatakan bahwa panel beranggotakan lima belas hingga tiga puluh pakar cukup representatif untuk mencapai konsensus yang stabil pada penelitian eksploratif berbasis expert judgment (Al-Jayyousi et al., 2022).

Tahapan penelitian secara ringkas disajikan pada Tabel 1 berikut, yang memetakan setiap fase penelitian beserta output dan teknik analisis yang digunakan.

Tabel 1. Tahapan dan Prosedur Penelitian Pengembangan IKEI

Tahap	Aktivitas	Teknik Analisis	Output
I. Eksplorasi Konseptual	Studi literatur green economy, maqashid al-syariah, dan prophetic economy	Analisis tematik & sintesis konseptual	Kerangka konseptual awal IKEI
II. Konstruksi Indikator	Penyusunan daftar indikator awal berdasarkan lima dimensi maqashid	Content analysis & expert brainstorming	Draf 35 indikator awal
III. Putaran Delphi I	Distribusi kuesioner kepada 21 pakar untuk menilai relevansi indikator	Fuzzy Delphi Method (skala linguistik 1-9)	Indikator tereduksi menjadi 28 item

Tahap	Aktivitas	Teknik Analisis	Output
IV. Putaran Delphi II	Konfirmasi ulang terhadap indikator hasil reduksi	Threshold value (d) dan persentase konsensus	Konsensus pakar $\geq 75\%$
V. Pembobotan	Penentuan bobot relatif antardimensi dan antarindikator	Analytical Hierarchy Process (AHP) & uji konsistensi	Matriks bobot dan Consistency Ratio
VI. Uji Reliabilitas	Pengujian kesepakatan antarpemilai terhadap struktur akhir indeks	Kendall's Coefficient of Concordance (W)	Koefisien W dan signifikansi statistik

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

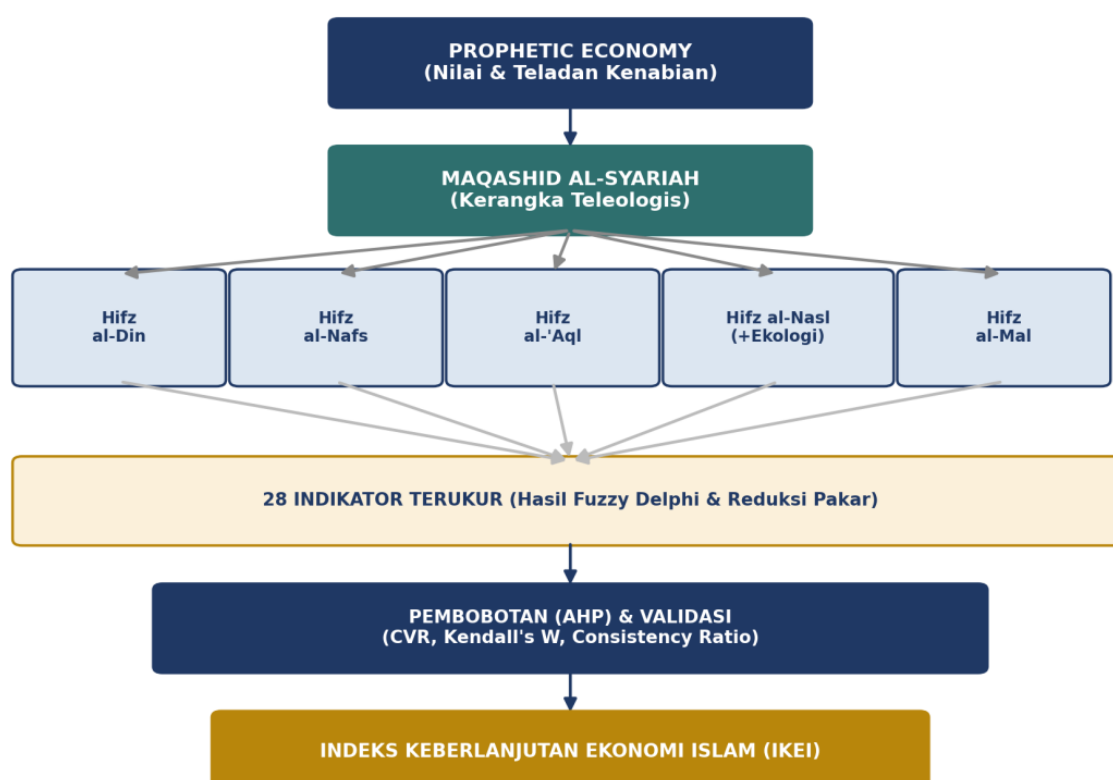
Instrumen Fuzzy Delphi Method digunakan pada putaran pertama untuk mereduksi daftar indikator awal berdasarkan tingkat relevansi yang dinilai oleh panel pakar menggunakan skala linguistik tujuh poin yang dikonversi ke dalam bilangan fuzzy segitiga. Indikator dipertahankan apabila nilai threshold (d) lebih kecil atau sama dengan 0,2 dan persentase pakar yang menyetujui indikator tersebut minimal 75 persen, sebagaimana ambang batas yang lazim digunakan dalam penelitian Fuzzy Delphi pada bidang ilmu sosial (Ammar et al., 2022). Proses ini menghasilkan reduksi dari 35 indikator awal menjadi 28 indikator final yang dianggap paling relevan dan representatif terhadap kelima dimensi maqashid.

Setelah tahap reduksi indikator, penelitian dilanjutkan dengan penerapan Analytical Hierarchy Process untuk menentukan bobot relatif setiap dimensi dan indikator melalui perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) yang diisi oleh sembilan pakar senior dari total panel Delphi. Konsistensi penilaian setiap responden diuji menggunakan *Consistency Ratio* (CR), dengan ambang batas CR kurang dari 0,1 sebagai syarat validitas matriks perbandingan, mengikuti prosedur baku yang dikembangkan Saaty dan telah banyak diaplikasikan dalam penelitian pembobotan indeks berbasis nilai keagamaan (Etika et al., 2024). Data hasil AHP kemudian diagregasi menggunakan metode rata-rata geometrik (*geometric mean*) untuk menghasilkan bobot konsensus kelompok yang merepresentasikan pandangan kolektif panel pakar.

Untuk menjamin validitas isi (*content validity*) konstruksi IKEI, penelitian ini menggunakan Content Validity Ratio (CVR) sebagaimana dikembangkan oleh Lawshe, di mana setiap indikator dinilai oleh panel pakar berdasarkan tingkat esensialitasnya terhadap dimensi maqashid yang diwakilinya. Sementara itu, reliabilitas antar-pemilai (*inter-rater reliability*) diuji menggunakan *Kendall's Coefficient of Concordance* (W) untuk mengukur tingkat kesepakatan pakar terhadap peringkat prioritas indikator, dengan interpretasi nilai W di atas 0,5 dianggap menunjukkan kesepakatan yang kuat dalam konteks penelitian berbasis panel ahli (Dewi, 2025). Kombinasi ketiga teknik analisis in Fuzzy Delphi, AHP, dan uji konkordansi Kendall memberikan fondasi metodologis yang cukup kuat bagi validitas dan reliabilitas IKEI sebagai instrumen pengukuran keberlanjutan ekonomi Islam yang baru.

Sebagai catatan metodologis, penelitian ini menyadari bahwa pendekatan expert judgment melalui Fuzzy Delphi dan AHP memiliki keterbatasan inheren, terutama terkait potensi bias seleksi pakar dan ketergantungan hasil pada komposisi panel yang dilibatkan. Untuk memitigasi risiko tersebut, peneliti menerapkan strategi triangulasi komposisi panel dengan melibatkan pakar dari latar belakang akademik, praktisi, dan regulator secara berimbang, serta menjaga anonimitas antarpartisipan selama proses Delphi berlangsung guna meminimalkan pengaruh hierarki sosial atau otoritas akademik tertentu terhadap independensi penilaian, sejalan dengan prinsip metodologis klasik Delphi yang menekankan pentingnya iterasi anonim dan umpan balik terkendali (Hamidi & Worthington, 2021).

Kerangka konseptual yang menghubungkan lima maqashid al-syariah dengan dimensi keberlanjutan ekonomi Islam divisualisasikan pada Gambar 1 berikut, yang menggambarkan alur logis dari nilai-nilai profetik menuju indikator terukur.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengembangan IKEI dari Prophetic Economy menuju Indikator Terukur

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Dimensi dan Indikator Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IKEI)

Hasil putaran Delphi menunjukkan bahwa panel pakar secara konsisten mengelompokkan indikator keberlanjutan ekonomi Islam ke dalam lima dimensi utama yang selaras dengan lima maqashid al-syariah, dengan penambahan penekanan eksplisit pada aspek ekologis di setiap dimensi. Dimensi hifz al-din diterjemahkan menjadi indikator-indikator yang mengukur tingkat kepatuhan syariah dan integrasi nilai spiritual dalam praktik bisnis, dimensi hifz al-nafs mencakup indikator kesehatan masyarakat dan keselamatan kerja, dimensi hifz al-

'aql mencakup literasi keuangan dan investasi pada pendidikan, dimensi hifz al-nasl diperluas mencakup indikator keadilan antargenerasi dan keberlanjutan lingkungan, sementara dimensi hifz al-mal mencakup indikator distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Bashori et al., 2024). Pengelompokan ini menegaskan bahwa maqashid al-syariah, ketika diinterpretasikan secara kontekstual, mampu mengakomodasi dimensi keberlanjutan modern tanpa kehilangan akar teologisnya.

Tabel 2 menyajikan struktur akhir IKEI setelah melalui proses reduksi Fuzzy Delphi dan pembobotan AHP. Bobot tertinggi diberikan pada dimensi hifz al-nasl yang diperluas (0,241), diikuti oleh hifz al-mal (0,223), hifz al-din (0,198), hifz al-nafs (0,182), dan hifz al-'aql (0,156). Tingginya bobot pada dimensi hifz al-nasl mengonfirmasi pandangan panel pakar bahwa keadilan antargenerasi dan keberlanjutan lingkungan merupakan prioritas mendesak dalam konteks krisis ekologis kontemporer, sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menekankan sentralitas keadilan antargenerasi dalam kerangka maqashid kontemporer (Busari et al., 2025). Nilai Consistency Ratio pada seluruh matriks perbandingan berpasangan berada di bawah 0,1, menunjukkan bahwa penilaian pakar cukup konsisten secara logis dan layak dijadikan dasar pembobotan indeks.

Menariknya, di antara 28 indikator yang tervalidasi, delapan indikator berada pada dimensi hifz al-nasl yang diperluas, menjadikannya dimensi dengan jumlah indikator terbanyak dibandingkan empat dimensi lainnya. Komposisi ini mencerminkan konsensus panel pakar bahwa isu keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi memerlukan operasionalisasi yang lebih granular dan multidimensional dibandingkan dimensi lain yang secara tradisional telah memiliki instrumen pengukuran yang lebih mapan dalam literatur ekonomi Islam, seperti hifz al-mal melalui rasio zakat atau hifz al-din melalui audit kepatuhan syariah (Di et al., 2024). Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa dimensi ekologis, alih-alih menjadi tambahan perifer, justru menempati posisi sentral dalam arsitektur IKEI sebagai representasi paling konkret dari visi prophetic economy yang diusung penelitian ini.

Tabel 2. Dimensi, Indikator Representatif, dan Bobot Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IKEI)

Dimensi Maqashid	Bobot Dimensi	Jumlah Indikator	Contoh Indikator Representatif
Hifz al-Din (Penjagaan Agama)	0,198	5	Tingkat kepatuhan syariah lembaga; integrasi nilai spiritual dalam tata kelola
Hifz al-Nafs (Penjagaan Jiwa)	0,182	5	Rasio kecelakaan kerja; akses layanan kesehatan bagi karyawan dan masyarakat sekitar
Hifz al-'Aql (Penjagaan Akal)	0,156	5	Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan; tingkat literasi keuangan syariah

Dimensi Maqashid	Bobot Dimensi	Jumlah Indikator	Contoh Indikator Representatif
Hifz al-Nasl (Penjagaan Keturunan & Ekologi)	0,241	8	Jejak karbon operasional; rasio investasi hijau; keadilan antargenerasi dalam alokasi sumber daya
Hifz al-Mal (Penjagaan Harta)	0,223	5	Rasio zakat dan wakaf terhadap aset; distribusi kekayaan (indeks Gini internal); efisiensi pengelolaan sumber daya

Sumber: Hasil Fuzzy Delphi dan AHP, diolah oleh peneliti (2026)

Uji Validitas Isi dan Reliabilitas Antar-Penilai

Hasil pengujian Content Validity Ratio menunjukkan bahwa dari 28 indikator final, seluruhnya memperoleh nilai CVR di atas ambang batas minimum 0,49 untuk panel beranggotakan 21 pakar sebagaimana tabel Lawshe, dengan nilai rata-rata CVR sebesar 0,71 yang mengindikasikan tingkat esensialitas indikator yang tinggi menurut penilaian kolektif pakar. Sementara itu, hasil uji Kendall's Coefficient of Concordance menunjukkan nilai W sebesar 0,68 dengan signifikansi statistik $p < 0,01$, yang mengindikasikan tingkat kesepakatan yang kuat di antara pakar terhadap peringkat prioritas dimensi dan indikator IKEI (Jan et al., 2021). Temuan ini memberikan dasar empiris yang cukup kuat bahwa konstruksi IKEI tidak hanya berlandaskan argumen teoretis semata, tetapi juga telah melalui proses validasi metodologis yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tabel 3 merangkum hasil uji validitas dan reliabilitas pada setiap tahap penelitian. Perlu dicatat bahwa tingkat konsensus pakar cenderung meningkat dari putaran Delphi pertama ke putaran kedua, dari 79 persen menjadi 91 persen, yang mengindikasikan proses konvergensi opini yang sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda groupthink yang berlebihan, mengingat panel pakar berasal dari latar belakang institusional dan disiplin keilmuan yang beragam. Pola konvergensi semacam ini konsisten dengan temuan metodologis dalam literatur Delphi yang menyatakan bahwa peningkatan konsensus antarputaran mengindikasikan proses pembelajaran kolektif (*collective learning*) di antara partisipan panel, bukan sekadar tekanan konformitas sosial (Made et al., 2025).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruksi IKEI

Parameter Uji	Putaran I	Putaran II	Interpretasi
Tingkat Konsensus Pakar (%)	79%	91%	Konvergensi opini meningkat dan stabil
Rata-rata Content Validity Ratio (CVR)	0,63	0,71	Di atas ambang batas minimum Lawshe (0,49)
Kendall's W (Koefisien Konkordansi)	0,54	0,68	Kesepakatan kuat antarpemilai ($p < 0,01$)

Parameter Uji	Putaran I	Putaran II	Interpretasi
Consistency Ratio rata-rata (AHP)	0,08	0,06	Konsisten secara logis (CR < 0,1)
Jumlah Indikator Final	31	28	Reduksi indikator redundan dan tumpang tindih

Sumber: Hasil pengolahan data pakar, diolah oleh peneliti (2026)

Perbandingan IKEI dengan Indeks Green Economy Konvensional

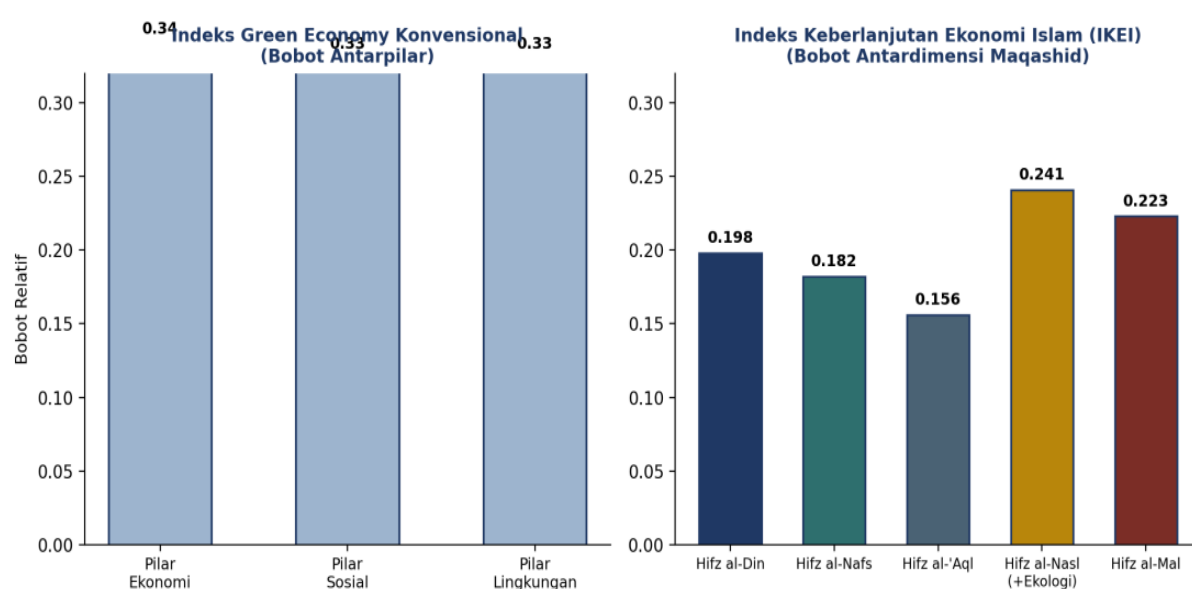
Perbandingan konseptual antara IKEI dan indeks green economy konvensional, seperti Green Growth Index dan Environmental Performance Index, memperlihatkan sejumlah perbedaan mendasar yang relevan untuk didiskusikan. Pertama, dari segi cakupan dimensi, indeks green economy konvensional umumnya berfokus pada tiga pilar—ekonomi, sosial, dan lingkungan—tanpa secara eksplisit mengintegrasikan dimensi spiritual-etis, sementara IKEI menempatkan dimensi hifz al-din sebagai salah satu pilar utama yang setara kedudukannya dengan dimensi ekonomi dan lingkungan (D'Amato & Korhonen, 2021). Kedua, dari segi orientasi temporal, indeks konvensional cenderung berorientasi jangka pendek hingga menengah sesuai siklus pelaporan tahunan, sementara dimensi hifz al-nasl dalam IKEI secara eksplisit mendorong perspektif antargenerasi yang berjangka lebih panjang, sejalan dengan konsep amanah dalam pengelolaan bumi yang diwariskan lintas generasi (Elbanna et al., 2025).

Ketiga, dari segi basis nilai, indeks green economy konvensional berlandaskan pada rasionalitas instrumental dan kalkulasi biaya-manfaat, sementara IKEI berlandaskan pada kerangka teleologis maqashid yang menempatkan kemaslahatan (masalah) sebagai prinsip pengorganisasian utama, bukan semata efisiensi ekonomi (Fahmy et al., 2026). Perbedaan basis nilai ini memiliki implikasi metodologis yang signifikan, terutama dalam penentuan bobot antardimensi: apabila indeks konvensional cenderung memberikan bobot yang proporsional berdasarkan data historis atau preferensi pasar, IKEI memberikan bobot berdasarkan hierarki maqashid yang telah mapan dalam tradisi ushul fiqh, meskipun tetap divalidasi secara empiris melalui konsultasi pakar kontemporer. Meski demikian, penting ditegaskan bahwa IKEI tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya indeks green economy konvensional, melainkan untuk melengkapi dan memperkaya perspektif keberlanjutan dengan dimensi yang selama ini kurang terakomodasi, khususnya bagi konteks masyarakat dan lembaga yang beroperasi dalam kerangka nilai Islam (Furqon et al., 2024).

Diagram perbandingan pada Gambar 2 memvisualisasikan perbedaan struktur bobot antara pendekatan konvensional yang cenderung merata di antara tiga pilar, dengan struktur IKEI yang memberikan penekanan lebih besar pada dimensi keadilan antargenerasi dan spiritual-etis. Visualisasi ini menegaskan bahwa perbedaan antara kedua pendekatan bukan sekadar perbedaan teknis dalam pembobotan, melainkan mencerminkan perbedaan filosofis yang lebih mendasar mengenai apa yang dianggap penting dan bernilai dalam mengevaluasi keberlanjutan sebuah sistem ekonomi (Indahsari et al., 2024).

Implikasi teoretis dari perbandingan ini adalah perlunya reformulasi konsep keberlanjutan itu sendiri dalam wacana akademik global, dari yang semula didominasi oleh perspektif sekuler-teknokratis menuju kerangka yang lebih pluralistik dan mengakomodasi worldview keagamaan sebagai sumber legitim bagi definisi kesejahteraan dan kemaslahatan. Sejumlah sarjana pembangunan internasional telah mulai mengakui pentingnya perspektif berbasis agama (faith-based perspectives) dalam merumuskan indikator pembangunan yang lebih inklusif secara kultural, sebuah kecenderungan yang sejalan dengan semangat penelitian ini dalam mengusulkan IKEI sebagai salah satu kontribusi konkret dari tradisi intelektual Islam terhadap wacana keberlanjutan global yang lebih beragam dan tidak monolitik (Harizah et al., 2024).

Gambar 2. Perbandingan Struktur Bobot: Indeks Konvensional vs IKEI



Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Diskusi: Implikasi Teoretis dan Praktis Prophetic Economy

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa transisi dari green economy menuju prophetic economy bukan sekadar pergantian label semantik, melainkan pergeseran paradigmatis yang substantif dalam cara memandang relasi antara manusia, ekonomi, dan alam. Sebagaimana ditunjukkan oleh struktur bobot IKEI yang memprioritaskan dimensi keadilan antargenerasi dan spiritual-etis, prophetic economy menawarkan kerangka evaluatif yang lebih holistik dibandingkan pendekatan konvensional yang cenderung mereduksi keberlanjutan pada dimensi teknis-ekologis semata (Munawir et al., 2023). Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya rekonstruksi epistemologi ekonomi Islam kontemporer agar tidak sekadar mereplikasi kategori dan indikator ekonomi konvensional dengan label syariah, melainkan benar-benar mengembangkan kerangka analitis yang berakar pada tradisi intelektual Islam itu sendiri, sebagaimana telah disuarakan oleh sejumlah pemikir ekonomi Islam kritis (Rabani et al., 2025).

Secara praktis, IKEI yang dikembangkan dalam penelitian ini berpotensi diaplikasikan pada beberapa level. Pada level makro, indeks ini dapat digunakan oleh otoritas moneter dan fiskal di negara-negara dengan populasi Muslim signifikan

untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi yang lebih selaras dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat, sebagaimana beberapa negara telah mengembangkan indeks pembangunan berbasis maqashid untuk keperluan perencanaan kebijakan (Pramono et al., 2025). Pada level meso, IKEI dapat diadaptasi oleh lembaga keuangan syariah untuk melengkapi pelaporan environmental, social, and governance (ESG) konvensional dengan dimensi spiritual-etis yang lebih spesifik terhadap konteks syariah, mengingat sejumlah kajian menunjukkan bahwa kerangka ESG konvensional belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keagamaan yang menjadi basis operasional lembaga keuangan syariah (Jaafar & Brightman, 2022).

Pada level mikro, IKEI juga dapat digunakan oleh individu maupun rumah tangga Muslim sebagai instrumen refleksi diri (self-assessment) mengenai sejauh mana praktik ekonomi personal mereka telah selaras dengan prinsip-prinsip prophetic economy, meskipun aplikasi pada level ini memerlukan penyederhanaan lebih lanjut agar lebih mudah diakses oleh masyarakat awam. Beberapa keterbatasan penelitian ini perlu dikemukakan secara jujur: pertama, validasi IKEI baru dilakukan melalui expert judgment dan belum diuji secara empiris pada data riil lembaga atau negara tertentu, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji validitas prediktif dan konstruk indeks ini secara kuantitatif; kedua, komposisi panel pakar yang didominasi oleh akademisi dan praktisi Indonesia berpotensi membatasi generalisasi temuan pada konteks negara Muslim lain yang memiliki tradisi ekonomi Islam dan struktur kelembagaan yang berbeda (Mashkoo et al., 2023). Kedua keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam.

Pengembangan IKEI lebih lanjut menuntut kolaborasi interdisipliner yang lebih intensif antara ahli ushul fiqh dan maqashid, ekonom kuantitatif, ilmuwan lingkungan, dan spesialis pengukuran psikometrik, mengingat kompleksitas menerjemahkan konsep teologis-filosofis ke dalam instrumen statistik yang valid dan reliabel memerlukan keahlian lintas bidang yang jarang dimiliki oleh satu individu peneliti. Model kolaborasi semacam ini telah terbukti efektif dalam pengembangan indeks-indeks sosial keagamaan lain yang melibatkan tim peneliti multidisipliner sejak tahap konseptualisasi awal hingga validasi akhir (Etika et al., 2024), dan pengalaman tersebut hendaknya menjadi rujukan metodologis bagi pengembangan lanjutan IKEI pada penelitian mendatang, termasuk potensi kolaborasi lintas negara untuk menghasilkan indeks yang lebih representatif secara global.

Implikasi bagi Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu episentrum pertumbuhan industri keuangan syariah global, temuan penelitian ini memiliki relevansi kebijakan yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, misalnya, telah mendorong berbagai inisiatif keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) yang sejauh ini masih banyak mengadopsi kerangka ESG konvensional tanpa penyesuaian substantif terhadap nilai-nilai keislaman yang menjadi basis operasional perbankan syariah nasional (Lestari et al., 2025). IKEI menawarkan kerangka pelengkap yang dapat diintegrasikan ke dalam regulasi pelaporan keberlanjutan lembaga keuangan syariah, sehingga penilaian kinerja tidak hanya mengacu pada standar internasional yang bersifat generik, tetapi juga mencerminkan karakter dan nilai lokal yang autentik.

Selain itu, dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mempertimbangkan adaptasi kerangka IKEI sebagai salah satu instrumen evaluasi tambahan bagi program-program ekonomi syariah dan filantropi Islam, termasuk pengelolaan dana zakat dan wakaf nasional yang selama ini dievaluasi terutama dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana tanpa metrik keberlanjutan yang komprehensif (Fauzi et al., 2025). Penerapan IKEI pada level lembaga pengelola zakat dan wakaf berpotensi mendorong akuntabilitas yang lebih holistik, mencakup tidak hanya efektivitas distribusi tetapi juga dampak jangka panjang terhadap keadilan antargenerasi dan kelestarian lingkungan sebagaimana dituntut oleh dimensi *hifz al-nasl*.

Tidak kalah penting, penguatan kerangka regulasi juga perlu didukung oleh insentif fiskal dan non-fiskal yang mendorong lembaga keuangan syariah untuk secara sukarela mengadopsi pelaporan berbasis IKEI, misalnya melalui skema penghargaan tahunan atau pengakuan reputasional bagi lembaga dengan skor IKEI tertinggi, sebagaimana skema serupa telah terbukti efektif mendorong adopsi pelaporan keberlanjutan pada industri keuangan konvensional di berbagai yurisdiksi (Shalhoob, 2025). Pendekatan insentif semacam ini dapat melengkapi pendekatan regulasi wajib (*mandatory*) yang seringkali menghadapi resistensi implementasi di tahap awal, sehingga transisi menuju pelaporan berbasis *prophetic economy* dapat berlangsung secara lebih organik dan partisipatif.

Pada level pendidikan tinggi, kerangka konseptual dan instrumen IKEI yang dikembangkan dalam penelitian ini juga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum program studi ekonomi Islam sebagai studi kasus penerapan *maqashid al-syariah* dalam riset kuantitatif, sekaligus mendorong mahasiswa dan peneliti muda untuk mengembangkan riset lanjutan yang menguji validitas prediktif indeks ini pada berbagai konteks kelembagaan dan kebijakan yang lebih luas, sehingga tradisi keilmuan ekonomi Islam terus berkembang secara kumulatif dan berbasis bukti (Mayanti et al., 2025).

KESIMPULAN

Artikel ini telah menguraikan argumentasi teoretis dan bukti empiris mengenai urgensi pergeseran paradigmatis dari *green economy* menuju *prophetic economy* dalam mengevaluasi keberlanjutan ekonomi Islam. Melalui kombinasi metode Fuzzy Delphi dan Analytical Hierarchy Process, penelitian ini berhasil mengonstruksi dan memvalidasi Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IKEI) yang terdiri atas lima dimensi selaras *maqashid al-syariah* dengan 28 indikator turunan, yang telah memenuhi kriteria validitas isi dan reliabilitas antar-penilai yang memadai secara statistik. Struktur bobot IKEI yang memprioritaskan dimensi *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* mencerminkan urgensi keadilan antargenerasi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan sebagai inti dari visi *prophetic economy* yang diusung penelitian ini.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka pengukuran yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi spiritual-etis ke dalam evaluasi keberlanjutan ekonomi, sebuah dimensi yang selama ini relatif absen dalam indeks *green economy* konvensional. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji validitas prediktif IKEI pada data empiris lembaga keuangan syariah

maupun kebijakan makroekonomi negara-negara Muslim, serta mengembangkan versi indeks yang lebih sederhana untuk aplikasi pada level rumah tangga dan individu. Dengan demikian, transisi dari green economy menuju prophetic economy diharapkan tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga instrumen transformatif bagi terwujudnya ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sejalan dengan visi rahmatan lil 'alamin.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa proyek besar mengintegrasikan nilai-nilai profetik ke dalam metrik ekonomi kontemporer bukanlah pekerjaan yang selesai dengan satu kali konstruksi indeks, melainkan sebuah agenda keilmuan berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi lintas disiplin antara ahli fikih, ekonom, dan ilmuwan lingkungan. IKEI yang dikembangkan dalam penelitian ini hendaknya dipahami sebagai titik awal, bukan titik akhir, dari upaya membangun arsitektur pengukuran keberlanjutan yang benar-benar berakar pada worldview Islam, sekaligus cukup rigor secara metodologis untuk dapat dipercaya dan digunakan oleh komunitas akademik dan pembuat kebijakan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam, & Muhammad. (2022). Green Economy and Some Relevancies from Islamic Finance Perspective. *Journal of Islamic Economic Literatures*. <https://doi.org/10.58968/jiel.v3i1.61>
- Adamowicz, M. (2022). Green Deal, Green Growth and Green Economy as a Means of Support for Attaining the Sustainable Development Goals. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14105901>
- Ahmad, D., & Khadim, S. (2025). Artificial Intelligence and Humanity: Ethical Challenges in the Light of Islamic Teachings. *International Journal of the Universe and Humanity in Islamic Vision and Perspective*. <https://doi.org/10.66320/5pqe1n02>
- Ahmed, U., Maruf, A., Alam, S., & Azizah, L. (2024). The Role of Islamic Finance in Sustainable and Green Transition. *Suhuf*. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i2.6314>
- Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Hasan, W. N. W., Janahi, N., & Yesuf, A. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14127300>
- Alam, A., Hayat, M., & Mahmood, S. M. J. (2023). An Attempt of Sustain Future by Means of Green Economy. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://doi.org/10.46254/na8.20230277>
- Alhawtmeh, O., Al-Nimr, E. M., & Alqmool, T. (2025). The impact of green economy on sustainable development in the Jordanian Islamic bank environment. *Heritage and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.37868/hsd.v7i1.1131>
- Ammar, R., Rebai, S., & Saidane, D. (2022). Toward the development of an Islamic banking sustainability performance index. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/imefm-12-2021-0479>
- Andini, B., Winario, M., & Khairi, R. (2026). Green Economy Dan Tanggung Jawab

- Moral Manusia Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*. <https://doi.org/10.63477/mjrs.v3i2.486>
- Anggara, C. N., Suropto, & Harori, I. (2025). Effect of Green Finance, Profitability, Leverage and Company Size on Financial Sustainability Ratio at Sharia Commercial Banks in Indonesia for the Period 2019-2023. *The Es Accounting And Finance*. <https://doi.org/10.58812/esaf.v3i02.472>
- Anisa, L. N. (2025). Sustainable Finance From The Perspective Of Maqashid Syariah. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Anwar, D., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>
- Aqim, M., Adlan, Adlan, M. A., Zahid, R. A., Shobir, L. M., Adlan, R. A., Zahid, L. M., & Shobir. (2025). Innovative Agriculture Based on Islamic Economics in the Development of Farmer Groups Towards a Green Economy. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*. <https://doi.org/10.33367/f2qp2f18>
- Ascarya, & Masrifah, A. R. (2023). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 130–153.
- Ayu, N., Asmuni, Kunci, K., Tunai, W., Masyarakat, P., Maqashid, & 'Asyur, I. (2023). Cash Waqf Management Perspective of Maqashid Syariah Ibn 'Asyr (UNISIA Cash Waqf Institution Study). *SOUTHEAST ASIA JOURNAL OF GRADUATE OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMICS*. <https://doi.org/10.37567/sajgibe.v2i2.2762>
- Azzam, H. A. (2025). Book Review: Towards a Maqasid al-Shariah Index of Socio-Economic Development; Theory and Application. *Maqasid Al-Shariah Review*. <https://doi.org/10.58968/msr.v3i1.661>
- Banjari, N. R. Al. (2023). PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN CARBON EMISSION DISCLOSURE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*. <https://doi.org/10.34128/jra.v6i2.302>
- Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). MAQASID SHARIAH-BASED DIGITAL ECONOMY MODEL: INTEGRATION, SUSTAINABILITY AND TRANSFORMATION. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.647>
- Bonang, D., Baihaqi, M., Syukriati, Rahmaawati, N., & Suhartini, N. (2026). Islamic worldview and the green economy: a philosophical nexus for sustainability and equity. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/ijoes-01-2025-0047>
- Busari, S. A., Mesawi, M. E. T. El, Laksana, N. N. M., & Suleimān, H. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah-Based Measuring Instruments in the Halal Economy: A Preliminary Review. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i3.409>
- Chaaben, N., Elleuch, Z., Hamdi, B., & Kahouli, B. (2022). Green economy

- performance and sustainable development achievement: empirical evidence from Saudi Arabia. *Environment, Development and Sustainability*, 1–16. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02722-8>
- D'Amato, D., & Korhonen, J. (2021). Integrating the green economy, circular economy and bioeconomy in a strategic sustainability framework. *Ecological Economics*, 188, 107143. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107143>
- Dewi, A. K. (2025). Sustainable Finance in Islamic Banking: A Systematic Review in the Context of Economic Instability. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3489>
- Di, S., Inspirasi, W. E., Al, P., Gunungkidul, M., Ayu, N., & Gustatnto, E. S. (2024). Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Perspektif Maqashid Syariah Di Wisata Edukasi Inspirasi Preneurship Al Mumtaz Gunungkidul. *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*. <https://doi.org/10.69879/hjtm3q11>
- Elbanna, M., Wadi, M. F., Radiamoda, A., Matsuyama, Y., & Ishak, M. A. A. Bin. (2025). A Bibliometric Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs) Through the Lens of Maqasid Shariah Tafsir. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.7360>
- Etika, C., Syariah, I. M., & Syariah, K. P. (2024). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Indeks Maqoshid Syariah Di Indonesia. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v7i3.21638>
- Fahmy, E., Hosen, M., Warninda, T., Rama, A., & Aimar, Q. (2026). Measuring Contemporary Islamic Banking Sustainability: Integrating ESG and Maqashid al-Syari'ah in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.12880>
- Fauzi, M., Afifah, K., Rusydiana, A. S., Rusydiana, S., Asnawi, I., Zafar, M. B., Hanif, M., Noor, M., Nurjanah, S., Mustafa, M. T., Afandi, M., & Salleh. (2025). Research Trend In Islamic Financial Technology And Blockchain: A Bibliometric Analysis. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.590>
- Furqon, M., Stiba, A., & Sukabumi, A. R. (2024). Prospek Implementasi Green Economy dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.69768/ja.v2i2.26>
- Hadi, M. Al. (2022). Fiqh Mu'āmalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>
- Hamidi, M., & Worthington, A. (2021). Islamic banking sustainability: theory and evidence using a novel quadruple bottom line framework. *International Journal of Bank Marketing*. <https://doi.org/10.1108/ijbm-06-2020-0345>
- Harizah, S., Sani, A., Masyhuri, & Mahsun, M. (2024). New Direction for Green Economics Through The Development of Global Islamic Economics: A Bibliometric Analysis. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.1879>
- Indahsari, L., Noviarita, H., Iqbal, M., Magister, F., & Syariah, E. (2024). Analysis of The Influence of Sharia Financial Institutions on Economic Growth in The Top Global Islamic Economy Index (GIEI) Countries. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi*

- & Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.4774>
- Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14095433>
- Jalili, I., Sitorus, I. R., Julir, N., Shulthoni, M., Ulfa, F., & Solihu, A. K. H. (2025). Role of Qawā'id Fiqhiyyah in Promoting Green Investment within Islamic Economics: Theoretical and Practical Frameworks. *Journal of Islamic Thought and Civilization*. <https://doi.org/10.32350/jitc.151.12>
- Jan, A., Mata, M., Albinsson, P., Martins, J., Hassan, R., & Mata, P. (2021). Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su13052607>
- Lestari, D. M., Furwanti, R., & Masri, S. (2025). Understanding Islamic Banking Usage Continuance in Indonesia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*. <https://doi.org/10.21154/invest.v5i1.10420>
- Made, I., Mandira, C., Basyariah, N., & Hariyadi, E. (2025). Developing A Hybrid Sustainability Performance Framework For Islamic Banks In Indonesia. *Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.22236/jei.v16i2.20049>
- Mashkoo, I. Al, Ali, J., & Al-Kanani, M. (2023). The Role of Green Activity-Based Costing in Achieving Sustainability Development: Evidence From Iraq. *International Journal of Professional Business Review*. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1276>
- Mayanti, Y., Setiawan, I., & Mulyawan, S. (2025). The Impact of Intellectual Assets, Islamic Sustainability Reporting, and Green Performance on Sharia-Based Corporate Value. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.18290>
- Miskari, M., Syahnan, H., Matsum, Indonesia, Pancasila, M., & Syariah. (2023). The Ideality of Pancasila and Reality of Maqaashid Syariah. *Al-Ulum*. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4234>
- Muklis, M., Bisri, A., Rahmat, P., & Hannum, U. (2025). Investasi Syariah sebagai Strategi Pembangunan Masa Depan yang Berkelanjutan: Kajian Konseptual dan Empiris. *MAMEN: Jurnal Manajemen*. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5928>
- Munawir, A., Azwar, M., Khaliza, S., & Yusuf, M. (2023). Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.29968>
- Pramono, S., Kanafi, I., Adinugraha, H., & Andrean, R. (2025). Analysis of the Influence of the Degree of Fiscal Decentralization, Balancing Funds, and Economic Growth on the Islamic Human Development Index (I-HDI) in 8 Provinces in Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v13i1.31164>
- Rabani, D. T., Sukuk, G., Syariah, K., Berkelanjutan, P., Al-Shariah, M., & Jawab, T. (2025). Green Sukuk sebagai Instrumen Hukum Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan*

Akuntansi Pajak. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1170>

Shalhoob, H. (2025). The role of AI in enhancing shariah compliance: Efficiency and transparency in Islamic finance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. <https://doi.org/10.24294/jipd11239>